

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pengadaan tanah di Indonesia untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan semakin meningkat, sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan usaha. Dengan hal itu meningkat pula kebutuhan akan dukungan berupa kepastian hukum di bidang pertanahan. Pemberian jaminan hukum di bidang pertanahan memerlukan perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas, yang dilaksanakan secara konsisten dengan jiwa dan isi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah bagi rakyat Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria yang kita kenal dengan UUPA. UUPA merupakan Hukum Agraria atau tanah Nasional Indonesia.

Tujuannya adalah akan mewujudkan apa yang digariskan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa :

*“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang penguasaannya ditugaskan kepada Negara Republik Indonesia harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Undang –undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berhubungan dengan segala sesuatu itu maka hukum yang baru tersebut sendi-sendi dan ketentuan-ketentuan pokoknya perlu disusun di dalam bentuk undang undang, yang akan merupakan dasar bagi penyusunan peraturan-peraturan lainnya.<sup>2</sup>

Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hakrakyat yang paling dasar. Tanah disamping mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi sosial, oleh karena itulah kepentingan pribadi atas tanah tersebut dikorbankan guna kepentingan umum. Ini dilakukan dengan pelepasan hak atas tanah dengan mendapat ganti rugi yang tidak berupa uang semata akan tetapi juga berbentuk tanah atau fasilitas lain.

Dalam perkembangannya, landasan hukum pengadaan tanah diatur dalam:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 (selanjutnya disebut “Pemendagri Nomor 15 Tahun 1975”) tentang Ketentuan – ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.
- b. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 (selanjutnya disebut “Keppres Nomor 55 Tahun 1993”), tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- c. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 (selanjutnya disebut “perpres Nomor 36 Tahun 2005”) selanjutnya diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 (selanjutnya disebut Perpres Nomor 65 Tahun 2006, dan

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar pokok – pokok Agraria

d. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut “perpres Nomor 71 Tahun 2012”) yang di sahkan pada tanggal 14 Agustus 2012, sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, yang disahkan pada tanggal 14 Januari 2012.

Perubahan peraturan satu terhadap peraturan yang lain timbul di latar belakang adanya upaya untuk melakukan perbaikan di bidang pengaturan hukum pengadaan tanah. Dengan diberlakukannya perpres 65 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Namun berdasarkan pertimbangan perpres tersebut tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat., maka diperlukan peraturan atau regulasi yang mengatur mengenai tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan kemanusiaan demokratis dan adil.<sup>3</sup>

Hukum tanah Nasional mengakui dan menghormati hak masyarakat atas tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah serta memberikan wewenang yang bersifat publik kepada negara berupa kewenangan untuk mengadakan pengaturan, membuat kebijakan, mengadakan pengelolaan, serta menyelenggarakan dan mengadakan pengawasan yang tertuang dalam pokok-pokok Pengadaan Tanah sebagai berikut:

---

<sup>3</sup>Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, penjelasan umum

1. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum dan Pendanaannya.
2. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan :
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah
  - b. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah
  - c. Rencana Strategis, dan
  - d. Rencana kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.
3. Pengadaan tanah diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pemangku dan pengampu kepentingan.
4. Penyelenggaraan Pengadaan Tanah memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
5. tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.<sup>4</sup>

Pada tahun 2012 pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang akan menjamin hak masing-masing pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Undang-undang baru ini membolehkan pemerintah untuk mengambil alih tanah untuk memfasilitasi pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang baru. Dan undang-undang ini bertujuan

---

<sup>4</sup>Ibid

untuk menghapus hambatan terbesar dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.<sup>5</sup>

Hak atas tanah memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk memakai suatu bidang tanah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan tertentu. Sedangkan tujuan pemakaian tanah pada hakekatnya adalah, pertama untuk diusahakan, misalnya untuk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kedua, tanah dipakai sebagai tempat membangun, misalnya bangunan gedung, lapangan, jalan, dan lain-lain.<sup>6</sup>

Masalah pembebasan tanah sangat rawan dalam penanganannya, karena di dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak, apabila dilihat dari kebutuhan pemerintah akan tanah untuk keperluan pembangunan, dapatlah dimengerti bahwa tanah negara yang tersedia sangatlah terbatas, oleh karena itu satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah dengan membebaskan tanah milik masyarakat, baik yang telah dikuasai dengan hak berdasarkan Hukum Adat maupun hak lainnya menurut UUPA.<sup>7</sup>

Proses pembebasan tanah tidak akan pernah lepas dengan adanya masalah ganti rugi, maka perlu diadakan penelitian terlebih dahulu terhadap segala keterangan dan data yang diajukan dalam mengadakan taksiran pemberian ganti rugi. Apabila telah tercapai suatu kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, maka baru dilakukan pembayaran ganti rugi

---

<sup>5</sup>Roosdiono "Undang-Undang Pertanahan yang Baru"

<sup>6</sup>Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, hal 288

<sup>7</sup>Adrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Ed. 1, Cet. 2 (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), Hal. 45

kemudian dilanjutkan dengan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah yang bersangkutan.

Mekanisme musyawarah yang seharusnya menjadi sarana untuk mencari jalan tengah dalam menentukan besarnya ganti kerugian seringkali tidak mencapai kata sepakat dan karenanya dengan alasan kepentingan umum, maka pemerintah melalui panitia pengadaan tanah dapat menentukan secara sepihak besarnya ganti rugi dan kemudian menitipkannya ke pengadilan negeri setempat.

Hal itulah yang kemudian menjadi permasalahan, bahwa yang diterapkan dalam Perpres ini berbeda dengan yang di atur dalam KUH Perdata, di mana dalam KUH Perdata dapat dilakukan jika sebelumnya terdapat hubungan hukum antara para pihak. Sedangkan dalam Perpres justru sebaliknya, diterapkan disaat kesepakatan antara para pihak tidak tercapai, tidak ada hubungan hukum sama sekali diantara para pihak tersebut.

Terungkapnya kasus-kasus berkenaan dengan gugatan terhadap pemerintah telah memunculkan rasa tidak aman bagi pemegang hak perorangan atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan terhadap hak atas tanah.

Berdasarkan penjelasan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan melakukan penelitian untuk penulisan skripsi yang berjudul **“GANTI RUGI TANAH YANG TIDAK TERCAPAI KESEPAKATAN ANTARA PEMILIK DAN PANITIA PELAKSANA**

**(Studi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Jalan Tol Solo-Kertosono Di Kabupaten Ngawi).”**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses pelaksanaan pelepasan hak atas tanah pembangunan jalan Tol Solo-Kertosono Di Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana penyelesaian ganti rugi terhadap tanah yang belum di sepakati di pembangunan jalan Tol Solo-Kertosono Di Kabupaten Ngawi?

**C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan hak atas tanah pembangunan jalan Tol Solo-Kertosono Di Kabupaten Ngawi.
2. Untuk mengetahui penyelesaian masalah ganti rugi yang belum ada kesepakatan antara pemilik hak dan panitia pelaksana di pembangunan jalan Tol Solo-Kertosono Di Kabupaten Ngawi.

**D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dan kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman secara terperinci mengenai penyelesaian masalah ganti rugi dan proses

pelaksanaan pelepasan tanah pembangunan jalan Tol Solo-Kertosono Di Kabupaten Ngawi.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil peneitia menjadi tambahan pengetahuan bagi penulis mengenai penyelesaian ganti rugi dan proses pelaksanaan pelepasan tanah pembangunan jalan Tol Solo-Kertosono Di Kabupaten Ngawi dan sebagai tugas akhir yang dijadikan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## E. Kerangka Pemikiran

Mengacu pada ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat dinyatakan bahwa: *"bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"*.

Untaian kata ini mengandung makna bahwa di dalamnya memberikan kekuasaan (baca kewenangan) pada negara (baca pemerintah) untuk mengatur sumber daya alam yang terkandung di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang diabdikan bagi kesejahteraan segenap rakyat Indonesia. Konsep dasar hak menguasai tanah oleh negara (disingkat menjadi : HMN) termuat dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: *"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"*.



Peraturan perundang-undangan di bidang agraria, memberi kekuasaan yang besar kepada negara untuk menguasai semua tanah yang ada di wilayah Indonesia, sehingga berpotensi melanggar hak ulayat dan hak perorangan atas tanah. Oleh karena itu, di kalangan ahli hukum timbul gagasan untuk membatasi wewenang negara yang bersumber pada HMN Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 58/PMK.02/2008 sebagai contoh misalnya dalam aktivitas pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan bagi kepentingan umum, maka panitia pengadaan tanah akan mendasarkan pada ketentuan tersebut sebagai dasar penetapan pemberian ganti-rugi dengan alasan sebagai berikut:

1. Biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum adalah biaya operasional yang disediakan untuk Panitia Pengadaan Tanah dalam rangka membantu pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.
2. Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja yang memerlukan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.
3. Besaran biaya operasional Panitia Pengadaan Tanah ditentukan paling tinggi 4% (empat perseratus) untuk ganti rugi sampai dengan atau setara Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan selanjutnya dengan prosentase menurun sebagaimana dasar perhitungan yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

4. Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada perhitungan ganti rugi yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah.
5. Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk pembayaran honorarium, pengadaan bahan, alat tulis kantor, cetak/ stensil, fotocopy/ penggandaan, penunjang musyawarah, sosialisasi, sidang-sidang yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah, satuan tugas (satgas), biaya keamanan, dan biaya perjalanan dalam rangka pengadaan tanah.

Kesimpulan yang dapat diambil dari Peraturan Menteri Keuangan No. 58/PMK.02/2008 bahwa persoalan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan bagi kepentingan umum hanyalah berakar pada pengalokasian anggaran untuk pembayaran ganti rugi kepada subyek bekas pemegang hak atas tanah, tidak pernah terpikirkan bagaimana implikasi sosial-ekonomibudaya perubahan hidup bekas pemegang hak atas tanah sesudah tanahnya diambil oleh pemerintah. Perpres No 36 Tahun 2005 dilaksanakan oleh Peraturan Kepala BPN No 3 Tahun 2007 sekaligus mencabut atau menyatakan tidak berlaku lagi Permen Agraria/Kepala BPN No 1 Tahun 1994.

Perolehan tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemda dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum diberikan untuk hak atas tanah, bangunan, tanaman,

dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Bentuknya dapat berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, dan/atau bentuk lain yang disetujui pihak-pihak yang bersangkutan. Musyawarah menghasilkan dua kemungkinan, yaitu kesepakatan, dan kedua tidak mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian antara pemegang hak atas tanah, instansi Pemerintah yang memerlukan tanah, dan Panitia Pengadaan Tanah. Perpres No 36 Tahun 2005 jo Perpres No 65 Tahun 2006 mengatur lembaga penitipan uang ganti kerugian ke Pengadilan Negeri (konsinyasi), yaitu dalam Pasal 10 nya. Dalam Pasal 10 ayat (2) Perpres No 65 Tahun 2006 dinyatakan bahwa : *“Apabila setelah diadakan musyawarah tidak tercapai kesepakatan, Panitia Pengadaan Tanah menetapkan besarnya ganti rugi dan menitipkan uang ganti rugi kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang bersangkutan”*.

Lembaga konsinyasi juga di atur dalam Pasal 37 dan Pasal 48 Peraturan Kepala BPN No 3 Tahun 2007, yaitu uang ganti rugi dapat dititipkan ke Pengadilan Negeri (PN) yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang bersangkutan dalam hal :

- a. Yang berhak atas ganti rugi tidak diketahui keberadaannya;
- b. Tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, sedang menjadi obyek perkara di pengadilan dan belum

memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- c. Masih dipersengketakan kepemilikannya dan belum ada kesepakatan penyelesaian dari para pihak;
- d. Tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah sedang diletakkan sita oleh pihak yang berwenang; dan
- e. pemilik tanah tetap menolak besarnya ganti rugi yang ditawarkan oleh instansi Pemerintah yang memerlukan tanah.

Berdasarkan Pasal 17 Perpres No 36 Tahun 2005, pemegang hak atas tanah yang tidak menerima keputusan Panitia Pengadaan Tanah mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dapat mengajukan keberatan kepada bupati/wali kota atau gubernur atau mendagri sesuai dengan kewenangan disertai dengan penjelasan mengenai sebab dan alasan keberatan itu.

Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 42 Peraturan Kepala BPN No 3 Tahun 2007, bila upaya penyelesaian yang ditempuh Bupati/Walikota, Gubernur atau Mendagri tetap tidak diterima pemilik tanah dan lokasi pembangunan yang bersangkutan tidak dapat dipindahkan, Bupati/Walikota, Gubernur atau Mendagri sesuai kewenangannya mengajukan usul penyelesaian dengan cara pencabutan hak atas tanah berdasarkan UU No 20 Tahun 1961. Apabila upaya penyelesaian mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi tetap tidak dapat diterima, dan

lokasi pembangunan yang bersangkutan tidak dapat dipindahkan, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pencabutan hak atas tanah kepada Presiden berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 1961.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk pedoman untuk melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.<sup>8</sup>

Penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode, baik dalam melakukan pengumpulan data, penelitian data dan melakukan analisa terhadap obyek penelitian. Adapun metode penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Bentuk Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dalam membahas masalah tersebut diatas menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan berdasarkan data pustaka dan norma-norma hukum tertulis dengan mengkaji penerapan atas kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2008, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal. 3

<sup>9</sup> Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, hal 295.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini lebih bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti, dimana dalam hal ini penulis memberi gambaran secara detail dan sistematis mengenai proses pemerian ganti rugi dan proses pelaksanaan pelepasan tanah pembangunan jalan tol Solo-Kertosono.<sup>10</sup>

## 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data :

- a. Data Primer ialah bahan-bahan buku yang mengikat.<sup>11</sup> Terdiri dari norma dasar yaitu Pancasila, peraturan dasar yaitu Undang-undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan.
- b. Data Sekunder ialah data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi peneliti.<sup>12</sup>

## 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data digunakan teknik sebagai berikut :

---

<sup>10</sup>Roni Hanitjo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimateri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal 58

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif*, hal 13

<sup>12</sup> Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal. 65.

a. Studi Kepustakaan (*library Research*)

Dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis dan mempelajari data-data yang berkaitan dengan obyek penelitian.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Yaitu dengan observasi dan wawancara (interview) adalah penting dilakukan. Wawancara merupakan teknik pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan keterangan lisan melalui percakapan dan berhadapan secara langsung dengan orang yang memberikan keterangan, yaitu mengadakan Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutan data kepol, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema.<sup>13</sup> Setelah data yang diperoleh dan diperlukan telah berkumpul semuanya, maka tindak selanjutnya adalah memberikan analisis terhadap data tersebut. Adapun metode analisis data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang menggunakan cara kerja dengan menjabarkan hasil penelitian berdasarkan penelitian dan pemaknaan terhadap data yang diperoleh. Metode ini digunakan apabila data hasil

---

<sup>13</sup> Lexy J.Moleong,1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 103.

penelitian tidak dapat diukur dengan angka atau dengan ukuran-ukuran lain yang bersifat eksek. Metode ini digunakan untuk menganalisis data yang menggunakan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti kemudian didiskusikan dengan data yang diperoleh dari objek sehingga dapat ditarik kesimpulan.

#### **G. Sistematika Skripsi**

Penulisan Penelitian ini mempunyai sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, meliputi Tinjauan Pelepasan Hak Atas Tanah Dalam Pembangunan, antara lain: Pengertian Pengadaan Tanah, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Dasar Hukum Pengadaan Tanah, Pemberian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah, Pengertian dan Bentuk Ganti Rugi, (2) Cara Perhiungan Ganti Rugi, meliputi Pihak Yang Berhak Menerima Ganti Rugi, dan (3) Pelaksanaan Pelepasan Hak Atas Tanah.



Bab III adalah Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Bab ini meliputi Proses pemberian ganti rugi yang terjadi di pembangunan jalan tol Solo-Kertosono dan Proses pelaksanaan hak atas tanah pembangunan jalan tol Solo-Kertosono.

Bab IV adalah Penutup. Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran.